

INDONESIA

DALAM PUSARAN
EKONOMI POLITIK KONTEMPORER



Rudy C Tarumingkeng

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

12 April 2026

INDONESIA DALAM PUSARAN EKONOMI POLITIK KONTEMPORER

Abstrak

Makalah ini membahas posisi Indonesia dalam pusaran ekonomi politik kontemporer, yaitu suatu situasi ketika dinamika pasar, kebijakan negara, teknologi, geopolitik, dan tuntutan kesejahteraan sosial saling berkelindan secara semakin kompleks. Tesis utama tulisan ini adalah bahwa Indonesia memasuki fase yang paradoksal: di satu sisi, fondasi makroekonomi relatif terjaga, pertumbuhan tetap berada di atas 5 persen pada 2025, kemiskinan dan ketimpangan menunjukkan perbaikan, inflasi masih berada dalam sasaran, serta sektor eksternal tetap cukup kuat; di sisi lain, kualitas pertumbuhan, produktivitas, penciptaan pekerjaan bernilai tambah, basis penerimaan negara, konsistensi institusi, dan keberanian reformasi struktural masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar. Makalah ini berargumen bahwa tantangan Indonesia bukan lagi sekadar menjaga stabilitas, melainkan mentransformasikan stabilitas menjadi lompatan pembangunan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, ekonomi politik Indonesia perlu dibaca bukan hanya sebagai soal angka pertumbuhan, tetapi juga sebagai arena negosiasi antara negara, pasar, masyarakat, dan kepentingan global. Tulisan ini menekankan bahwa keberhasilan Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan menyelaraskan disiplin fiskal, reformasi birokrasi, penguatan demokrasi,

industrialisasi bernilai tambah, dan pembangunan sumber daya manusia dalam satu arah strategis yang konsisten. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kata kunci: ekonomi politik, Indonesia, pertumbuhan, hilirisasi, demokrasi, kebijakan fiskal, reformasi struktural, geopolitik.

Indonesia dalam Pusaran Ekonomi Politik Kontemporer

Pendahuluan

Membicarakan Indonesia dalam pusaran ekonomi politik kontemporer berarti membicarakan sebuah bangsa yang sedang bergerak di antara stabilitas dan ketegangan, antara ambisi menjadi negara maju dan kenyataan bahwa struktur ekonominya masih menyimpan banyak kerentanan. Ekonomi politik kontemporer tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai hubungan antara pemerintah dan pasar. Ia telah menjadi ruang yang lebih luas, tempat kebijakan fiskal, suku bunga, investasi, perdagangan, digitalisasi, transisi energi, tata kelola, fragmentasi geopolitik, dan legitimasi politik saling memengaruhi. Dalam lanskap seperti ini, Indonesia tidak berdiri di luar arus global, melainkan berada tepat di dalamnya. Ketika perang, ketegangan dagang, volatilitas keuangan, dan perubahan rantai pasok dunia meningkat, Indonesia dipaksa untuk terus menegosiasikan kepentingan nasionalnya secara lebih cerdas dan lebih strategis. Bank Indonesia secara eksplisit menyebut memburuknya kondisi global, termasuk perang di Timur Tengah, sebagai faktor yang memengaruhi stabilitas nilai tukar dan arah kebijakan moneter, sementara IMF menilai risiko ke depan berasal dari guncangan kebijakan perdagangan, ketidakpastian berkepanjangan, dan volatilitas pasar keuangan global. ([Bank Indonesia](#))

Di tengah situasi tersebut, Indonesia tetap menunjukkan daya tahan yang tidak kecil. BPS melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025, lebih tinggi dibandingkan 5,03 persen pada 2024. Pada September 2025, persentase penduduk miskin turun menjadi 8,25 persen, sementara gini ratio menurun menjadi 0,363. Tingkat pengangguran terbuka pada November 2025 juga tercatat 4,74 persen. Data-data ini penting, sebab ia menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara yang sedang runtuh secara ekonomi. Namun, data yang baik tidak otomatis identik dengan transformasi struktural yang cukup dalam. World Bank justru mengingatkan bahwa pasar kerja Indonesia masih didominasi sektor bernilai tambah rendah dan tantangan “good jobs” masih kuat, meskipun pertumbuhan dan penciptaan kerja terus berlangsung. Dengan kata lain, problem Indonesia kini tidak hanya soal bertumbuh, melainkan bertumbuh dengan mutu yang cukup tinggi untuk mengangkat produktivitas, upah, mobilitas sosial, dan daya saing jangka panjang. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Di sinilah ekonomi politik menjadi relevan. Ia membantu kita memahami bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hasil otomatis dari mekanisme pasar, melainkan buah dari konfigurasi kekuasaan, institusi, insentif, kapasitas negara, dan arah kebijakan. Ketika negara memilih hilirisasi, deregulasi, insentif investasi, atau perlindungan sosial, sesungguhnya negara sedang membentuk ulang distribusi manfaat dan biaya dalam masyarakat. Maka, pertanyaan pokok tulisan ini adalah: bagaimana membaca posisi Indonesia di tengah pergeseran ekonomi politik kontemporer, dan agenda apa yang paling penting agar Indonesia tidak sekadar stabil, tetapi benar-benar naik kelas?

Ekonomi Politik Kontemporer sebagai Kerangka Baca

Secara konseptual, ekonomi politik kontemporer dapat dipahami sebagai studi mengenai bagaimana kekuasaan memengaruhi alokasi sumber daya, dan bagaimana struktur ekonomi pada gilirannya memengaruhi distribusi

kekuasaan. Dalam ekonomi politik klasik, fokus sering diletakkan pada peran negara, kelas sosial, kepemilikan, dan distribusi. Dalam ekonomi politik kontemporer, unsur-unsur itu tetap ada, tetapi kini diperluas oleh realitas baru: kapital global yang sangat mobile, platform digital, arsitektur rantai pasok lintas negara, lembaga pemeringkat, sovereign wealth fund, agenda iklim, standar tata kelola internasional, dan tekanan transparansi publik. Negara modern tidak lagi hanya bersaing dalam produksi barang, tetapi juga dalam kualitas institusi, kecepatan regulasi, mutu SDM, kapasitas inovasi, dan kredibilitas kebijakan.

Bagi Indonesia, kerangka ini penting karena struktur ekonominya berada di persimpangan. Indonesia memiliki keunggulan demografi, pasar domestik besar, sumber daya alam melimpah, dan posisi geografis strategis. Namun, ia juga menghadapi jebakan yang khas negara berpendapatan menengah: produktivitas yang bergerak lebih lambat dari ambisi pertumbuhan, pekerjaan formal berkualitas yang belum cukup, sektor manufaktur yang harus terus diperkuat, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang tidak kecil. OECD menilai akses Indonesia ke OECD adalah proses transformasional yang mendukung ambisi Indonesia menjadi ekonomi maju pada 2045, dan pemerintah Indonesia sendiri memandang proses itu sebagai katalis reformasi struktural. Pandangan ini menunjukkan bahwa ekonomi politik Indonesia hari ini tidak bisa dipisahkan dari upaya penyesuaian terhadap standar tata kelola, keterbukaan, dan daya saing global. ([OECD](#))

Dengan demikian, membaca Indonesia secara kontemporer berarti memandang negara ini sebagai arena kompromi dan kontestasi. Negara berupaya mempercepat pembangunan melalui APBN, investasi, hilirisasi, dan kebijakan industri. Pasar menuntut kepastian, efisiensi, dan profitabilitas. Masyarakat menuntut lapangan kerja, harga yang terjangkau, serta pelayanan publik yang adil. Sementara dunia internasional menekan lewat standar fiskal, lingkungan, perdagangan, dan kredit. Seluruhnya

saling bertemu dalam keputusan-keputusan kebijakan yang tampak teknokratis, tetapi sesungguhnya sangat politis.

Stabilitas Makroekonomi: Prestasi yang Penting, tetapi Belum Cukup

Tidak dapat disangkal bahwa salah satu kekuatan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah kemampuannya menjaga stabilitas makroekonomi. BPS mencatat inflasi tahunan Maret 2026 sebesar 3,48 persen. Sasaran inflasi pemerintah dan Bank Indonesia untuk 2025–2027 adalah 2,5 persen dengan koridor ± 1 persen, sehingga inflasi Maret 2026 masih berada di dalam rentang sasaran, meskipun dekat dengan batas atas. Pada saat yang sama, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate di 4,75 persen pada Maret 2026, dengan alasan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan inflasi tetap terkendali. Kombinasi ini menunjukkan bahwa otoritas moneter sedang mencoba menyeimbangkan dua tujuan yang sering tegang satu sama lain: mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Sektor eksternal juga menunjukkan ketahanan. Neraca perdagangan Indonesia pada Januari–Februari 2026 masih mencatat surplus sebesar US\$2,23 miliar, didukung surplus nonmigas US\$5,42 miliar, meskipun sektor migas tetap defisit. Posisi cadangan devisa akhir Maret 2026 sebesar US\$148,2 miliar, setara 6,0 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. Dalam bahasa ekonomi politik, indikator ini penting karena memberi ruang gerak kebijakan. Negara yang cadangan devisanya rapuh akan lebih mudah dipaksa menyesuaikan diri oleh gejolak global. Sebaliknya, cadangan devisa yang memadai memberi bantalan bagi otoritas untuk merespons tekanan eksternal tanpa masuk ke kepanikan kebijakan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dari sisi fiskal, APBN 2026 dirancang dengan defisit 2,68 persen terhadap PDB, lebih rendah dari 2025 dan tetap di bawah ambang 3 persen. Hingga akhir Februari 2026, pendapatan negara mencapai Rp358 triliun atau 11,4

persen dari target dan tumbuh 12,8 persen secara tahunan; belanja negara mencapai Rp493,8 triliun atau 12,8 persen dari pagu; dan defisit APBN tercatat Rp135,7 triliun atau 0,53 persen dari PDB. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah masih berusaha memadukan disiplin fiskal dengan kebutuhan ekspansi untuk program prioritas. Di sinilah salah satu karakter ekonomi politik Indonesia tampak jelas: APBN tidak semata alat akuntansi, tetapi instrumen legitimasi negara, penyangga guncangan, dan pengarah prioritas pembangunan.

Namun demikian, stabilitas makro hanya fondasi, bukan tujuan akhir. IMF menilai pertumbuhan Indonesia tetap kuat, inflasi berada dalam kisaran target, dan sektor keuangan cukup tangguh, tetapi pada saat yang sama menekankan bahwa pertumbuhan yang tahan lama dan berkualitas tinggi mensyaratkan reformasi struktural yang berani dan kokoh. Peringatan ini penting. Banyak negara mampu mencatat angka makro yang rapi dalam jangka pendek, tetapi gagal mengubahnya menjadi produktivitas tinggi, inovasi, dan mobilitas sosial. Dengan demikian, pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah Indonesia stabil, melainkan apakah stabilitas itu sedang diubah menjadi lompatan kualitas pembangunan. ([IMF](#))

Politik Pembangunan Era Baru: Negara yang Lebih Aktif

Indonesia saat ini memasuki fase ketika negara kembali tampil lebih aktif sebagai pengarah pembangunan. Dalam RPJMN 2025–2029, pemerintah menegaskan visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045,” dengan delapan prioritas nasional yang merupakan implementasi langsung dari Asta Cita. Prioritas pertama secara eksplisit menyebut penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, sementara agenda lain menekankan swasembada pangan dan energi, penguatan SDM, serta transformasi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa proyek pembangunan nasional tidak hanya diposisikan sebagai urusan pertumbuhan, tetapi sebagai paket besar yang menggabungkan legitimasi politik, kedaulatan strategis, dan modernisasi ekonomi. ([Setneg](#))

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, orientasi pembangunan terlihat semakin menonjol pada konsep negara yang lebih strategis: negara yang tidak pasif menunggu pasar bekerja, melainkan mencoba mengarahkan investasi, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta menggunakan lembaga publik sebagai pengungkit transformasi. Peluncuran Danantara dan penekanan atas perannya sebagai katalis investasi strategis mencerminkan kecenderungan ini. Dalam presentasi resmi Indonesia pada Maret 2026, Danantara disebut mendukung pengelolaan makroekonomi dengan berperan sebagai katalis investasi strategis, sambil mendukung program prioritas nasional. Ini adalah bentuk state capitalism yang lebih modern: negara tidak selalu mengambil alih seluruh pasar, tetapi berupaya memengaruhi arah akumulasi modal melalui lembaga investasi, BUMN, dan proyek-proyek prioritas. ([Kementerian Keuangan](#))

Di satu sisi, pendekatan seperti ini dapat menjadi kekuatan. Negara berkembang kerap gagal naik kelas bukan karena terlalu banyak campur tangan negara, tetapi karena negara terlalu lemah, terlalu terfragmentasi, atau terlalu reaktif. Kebijakan industri, pembangunan infrastruktur, pembiayaan jangka panjang, dan transisi energi hampir selalu membutuhkan negara yang mampu bertindak. Namun, di sisi lain, negara yang aktif juga memerlukan guardrails yang kuat: tata kelola, transparansi, pengawasan, evaluasi, dan akuntabilitas. Tanpa itu, kebijakan industri dapat berubah menjadi rente, proteksi yang tak efisien, atau konsentrasi kekuasaan ekonomi di tangan kelompok tertentu. Maka, inti persoalannya bukan “lebih banyak negara” versus “lebih banyak pasar,” melainkan apakah negara yang aktif itu juga negara yang cakap, disiplin, dan akuntabel.

Hilirisasi, Investasi, dan Perebutan Nilai Tambah

Salah satu poros utama ekonomi politik Indonesia kontemporer adalah hilirisasi. Ide dasarnya sederhana tetapi strategis: Indonesia tidak ingin

terus-menerus menjadi pengeksport bahan mentah, melainkan ingin menggeser posisinya ke bagian rantai nilai yang lebih tinggi. Dalam presentasi resmi Bank Indonesia Maret 2026, disebutkan bahwa industri hilir terus menarik investasi kuat sebesar Rp584,1 triliun pada 2025 atau 30,2 persen dari total investasi, terutama didorong oleh sektor mineral dan batu bara. Sementara itu, Kementerian Investasi/Hilirisasi-BKPM menyatakan realisasi investasi 2025 melampaui target dan investasi sektor hilirisasi melonjak 43,3 persen. Angka-angka ini menunjukkan bahwa hilirisasi bukan lagi slogan, melainkan telah menjadi medan utama pembentukan ulang struktur ekonomi Indonesia. ([Bank Indonesia](#))

Secara ekonomi politik, hilirisasi penting karena ia menyentuh pertanyaan mendasar: siapa yang menikmati nilai tambah dari kekayaan alam Indonesia? Selama beberapa dekade, banyak negara kaya sumber daya terjebak dalam model ekstraktif, di mana nilai terbesar justru dinikmati di luar negeri melalui pemrosesan, teknologi, dan penguasaan pasar. Hilirisasi adalah upaya mematahkan pola itu. Ia berupaya menahan sebagian proses produksi di dalam negeri, menciptakan pekerjaan, mendorong investasi manufaktur, dan membangun ekosistem industri baru. Dalam pengertian ini, hilirisasi bukan sekadar agenda ekonomi, tetapi proyek kedaulatan nasional.

Akan tetapi, hilirisasi juga mengandung sejumlah pertanyaan kritis. Pertama, apakah nilai tambah itu benar-benar tersebar luas, atau hanya terkonsentrasi pada kantong-kantong industri tertentu? Kedua, apakah hilirisasi menghasilkan penguasaan teknologi domestik, atau sebatas pemindahan proses pengolahan tanpa transfer kapabilitas yang mendalam? Ketiga, apakah hilirisasi terintegrasi dengan pendidikan vokasi, riset, dan pemasok lokal, atau justru menciptakan enclave yang terputus dari ekonomi daerah? Keempat, bagaimana keberlanjutan fiskal dan lingkungan dari strategi ini? Makna keberhasilan hilirisasi tidak boleh disederhanakan hanya menjadi nilai investasi atau besarnya output ekspor,

tetapi harus diukur pula dari kualitas pekerjaan, kedalaman rantai pasok domestik, dan peningkatan kemampuan teknologi nasional.

Di sinilah relevansi kritik World Bank menjadi penting. Lembaga ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia terus menciptakan pekerjaan, banyak pekerjaan baru masih muncul di sektor bernilai tambah rendah, dan sebagian besar pekerja terkonsentrasi pada aktivitas berproduktivitas rendah. Jika hilirisasi tidak dihubungkan dengan strategi “good jobs,” maka Indonesia berisiko memiliki industri yang tumbuh, tetapi dampak sosial-ekonominya tidak sekuat yang diharapkan. Analogi sederhananya adalah begini: sebuah smelter dapat menaikkan statistik investasi nasional, tetapi pertanyaan yang lebih dalam adalah apakah ia menciptakan mobilitas kelas menengah yang luas, keterampilan baru, dan inovasi domestik. ([The World Bank Docs](#))

Pasar Kerja, Kelas Menengah, dan Kualitas Pertumbuhan

Bagian paling penting dari ekonomi politik sesungguhnya terletak pada pengalaman konkret warga negara. Pertumbuhan ekonomi yang tidak menjelma menjadi pekerjaan layak akan cepat kehilangan legitimasi sosial. BPS memang menunjukkan perbaikan pada kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Pada September 2025, jumlah penduduk miskin turun menjadi 23,36 juta orang; gini ratio turun menjadi 0,363; dan pengangguran terbuka pada November 2025 berada pada 4,74 persen. Rata-rata upah buruh pada November 2025 mencapai Rp3,33 juta. Data ini memberi sinyal bahwa ada perbaikan, terutama bila dibandingkan periode sebelumnya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun, ekonomi politik menuntut kita membaca lebih dalam dari sekadar penurunan angka agregat. Kemiskinan bisa turun, tetapi kerentanan tetap tinggi. Ketimpangan bisa menurun, tetapi akses terhadap pekerjaan berkualitas, pendidikan unggul, dan peluang mobilitas belum tentu merata. Pengangguran bisa rendah, tetapi underemployment, informalitas, dan pekerjaan berupah rendah bisa tetap besar. World Bank menyoroti bahwa

tantangan utama Indonesia kini adalah penciptaan pekerjaan kelas menengah; dalam laporan Juni 2025 disebutkan bahwa 52 persen pekerjaan baru tercipta di sektor bernilai tambah rendah, dan 69 persen pekerja berada pada aktivitas yang menghasilkan nilai tambah kurang dari Rp8 juta per bulan. Sementara itu, laporan Desember 2025 menegaskan bahwa pasar kerja masih menghadapi persoalan kesejahteraan rumah tangga karena banyak pekerjaan yang tercipta belum memberikan upah kelas menengah. ([The World Bank Docs](#))

Narasi ini penting karena kelas menengah adalah bantalan sosial dan politik bagi demokrasi modern. Bila kelas menengah stagnan, konsumsi akan melemah, aspirasi sosial meningkat, dan kepercayaan pada institusi dapat tergerus. Dalam konteks Indonesia, problem “good jobs” juga terkait dengan mutu pendidikan, mismatch keterampilan, lemahnya produktivitas UMKM, serta belum cukup kuatnya daya serap sektor manufaktur dan jasa modern. Maka, agenda pembangunan tidak boleh berhenti pada penyediaan lapangan kerja apa pun, tetapi harus bergerak ke arah pekerjaan yang lebih produktif, lebih formal, dan lebih berjenjang. Pertumbuhan yang tidak memperkuat kelas menengah hanya akan menghasilkan stabilitas yang rapuh.

Fiskal, Legitimasi, dan Batas Negara

Di banyak negara berkembang, APBN bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan juga mekanisme produksi legitimasi. Negara dinilai hadir ketika subsidi tersedia, bantuan sosial berjalan, proyek infrastruktur terlihat, harga relatif terjaga, dan pelayanan publik membaik. Karena itu, tekanan terhadap APBN di Indonesia tidak pernah hanya teknis. Ia selalu politis. Pemerintah harus membiayai prioritas pembangunan, melindungi masyarakat, menjaga investor tetap percaya, dan tetap memelihara disiplin fiskal.

RAPBN 2026 dan perkembangan awal APBN 2026 menunjukkan upaya menjaga keseimbangan itu. Pemerintah merancang belanja negara sekitar

Rp3.786,5 triliun pada RAPBN 2026, dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen. APBN 2026 juga diposisikan untuk mendukung kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi, serta memperkuat investasi produktif, termasuk melalui Danantara. Pada saat yang sama, defisit dijaga di 2,68 persen terhadap PDB. Artinya, negara ingin tetap ekspansif, tetapi tidak sembrono. Ini adalah seni ekonomi politik: menggunakan fiskal untuk mengarahkan pembangunan, tanpa merusak kredibilitas makro.

([Kementerian Keuangan](#))

Akan tetapi, batas negara juga nyata. Basis penerimaan Indonesia belum sekuat kebutuhan pembangunannya. Kinerja penerimaan negara awal 2026 memang membaik, tetapi tantangan strukturalnya tetap besar: tax ratio yang harus diperkuat, administrasi perpajakan yang harus makin andal, belanja yang harus makin berkualitas, dan pembiayaan kreatif yang harus tetap prudent. IMF menekankan perlunya guardrails yang kuat untuk mencegah akumulasi kerentanan, sedangkan World Bank menilai kebijakan fiskal perlu terus diarahkan agar mendukung pertumbuhan yang lebih berkualitas. Dengan kata lain, ruang fiskal Indonesia masih harus diperjuangkan, bukan diasumsikan tersedia otomatis. ([Fiskal Kemenkeu](#))

Dalam hal ini, efisiensi belanja menjadi kata kunci. Negara yang kredibel bukanlah negara yang sekadar besar belanjanya, tetapi negara yang mampu mengubah setiap rupiah menjadi hasil pembangunan yang terukur. Jika tidak, tekanan untuk membiayai prioritas akan bertemu dengan kekhawatiran investor, lembaga pemeringkat, dan publik domestik. Di sinilah persoalan fiskal berubah menjadi persoalan kepercayaan.

Peringkat Kredit, Kepercayaan Investor, dan Sinyal Pasar

Pusaran ekonomi politik kontemporer juga memperlihatkan bahwa negara tidak hanya dinilai oleh rakyatnya sendiri, tetapi juga oleh pasar keuangan global. Pada 2026, Moody's mempertahankan peringkat kredit Indonesia di Baa2 tetapi mengubah outlook menjadi negatif. Fitch juga mempertahankan peringkat BBB dan menyesuaikan outlook menjadi

negatif. Sebaliknya, S&P mempertahankan peringkat Indonesia di BBB dengan outlook stabil. Bagi pembaca ekonomi politik, pesan dari konfigurasi ini cukup jelas: pasar masih memandang Indonesia sebagai negara investment grade yang relatif kuat, tetapi kehati-hatian terhadap risiko masa depan meningkat. ([Kementerian Keuangan](#))

Ini bukan kabar buruk dalam arti sederhana, tetapi juga bukan alasan untuk berpuas diri. Ia menandakan bahwa stabilitas Indonesia diakui, tetapi keberlanjutannya sedang diuji. Kredibilitas makro, kualitas institusi, arah kebijakan BUMN, pengelolaan pembiayaan, dan konsistensi reformasi akan terus diawasi. Jika dibaca secara sehat, sinyal pemeringkat seharusnya bukan memicu defensif, melainkan menjadi pengingat bahwa ambisi pembangunan memerlukan manajemen risiko yang sama kuatnya dengan dorongan ekspansi.

Geopolitik, Perdagangan, dan Strategi Bebas-Aktif yang Diperbarui

Ekonomi politik Indonesia hari ini tak bisa dilepaskan dari perubahan geopolitik. Perang di Timur Tengah, fragmentasi perdagangan, persaingan teknologi, dan re-konfigurasi rantai pasok global telah menjadikan ekonomi internasional lebih politis daripada sebelumnya. Bank Indonesia secara eksplisit mengaitkan kebijakan suku bunganya dengan memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah. IMF menegaskan bahwa kejutan kebijakan perdagangan dan volatilitas pasar global menjadi risiko utama. OECD juga memproyeksikan bahwa friksi perdagangan global akan menahan pertumbuhan ekspor Indonesia. Ini berarti bahwa agenda pertumbuhan Indonesia semakin bergantung pada kecakapan mengelola dunia yang tidak stabil. ([Bank Indonesia](#))

Dalam konteks ini, prinsip politik luar negeri bebas-aktif memerlukan pembacaan yang lebih ekonomis. Bebas-aktif pada abad ke-21 bukan hanya soal tidak berpihak secara militer atau diplomatik, tetapi juga soal kecakapan menjaga ruang kebijakan ekonomi. Indonesia perlu cukup terbuka untuk menarik investasi, teknologi, dan pasar; namun juga cukup

berhati-hati agar tidak jatuh pada ketergantungan sempit terhadap satu kekuatan atau satu komoditas. Strategi semacam ini menuntut diversifikasi mitra, penguatan industri domestik, pendalaman pasar keuangan lokal, serta peningkatan posisi tawar dalam negosiasi dagang dan investasi.

Akresi OECD dapat dibaca dalam kerangka ini. Pemerintah dan OECD sama-sama menggambarkannya sebagai langkah strategis menuju reformasi dan peningkatan standar. Secara ekonomi politik, akresi OECD adalah sinyal: Indonesia ingin dilihat bukan hanya sebagai pasar besar atau pemasok komoditas, tetapi sebagai negara yang siap menyesuaikan diri dengan standar tata kelola, persaingan, transparansi, dan kebijakan publik yang lebih tinggi. Namun, sinyal global harus disertai pekerjaan domestik yang serius. Tanpa reformasi nyata di dalam negeri, diplomasi standar hanya akan menjadi kosmetik. ([OECD](#))

Demokrasi, Birokrasi, dan Kualitas Negara

Ekonomi politik tidak akan lengkap tanpa bicara tentang kualitas negara. Negara yang efektif bukan hanya punya anggaran dan regulasi, tetapi juga punya birokrasi yang mampu menerjemahkan visi menjadi implementasi. RPJMN 2025–2029 menempatkan demokrasi, HAM, dan penguatan ideologi pada prioritas nasional. Ini penting karena pembangunan jangka panjang membutuhkan institusi yang dipercaya publik. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, pertumbuhan ekonomi harus bertumpu pada legitimasi prosedural dan rasa keadilan, bukan sekadar hasil agregat. ([Setneg](#))

Di sinilah tantangan besar Indonesia: bagaimana membangun negara yang tegas tetapi tidak tertutup, aktif tetapi tidak eksekutif, cepat tetapi tetap akuntabel. Kebijakan hilirisasi, penguatan BUMN, sovereign fund, dan proyek strategis memerlukan birokrasi yang adaptif. Namun sejarah banyak negara menunjukkan bahwa birokrasi yang tidak disiplin dapat mengubah proyek pembangunan menjadi pemborosan, korupsi, atau kebijakan yang

bias elite. Karena itu, penguatan tata kelola bukan pelengkap pembangunan; ia adalah jantung pembangunan itu sendiri.

Dalam praktiknya, kualitas negara akan diuji pada hal-hal yang sangat konkret: konsistensi regulasi, kecepatan perizinan, penegakan hukum kontrak, kualitas data publik, dan koordinasi pusat-daerah. Banyak agenda pembangunan Indonesia tersendat bukan karena idenya salah, tetapi karena implementasi lintas lembaga dan lintas level pemerintahan belum seefektif yang dibutuhkan. Ekonomi politik Indonesia, oleh sebab itu, adalah juga ekonomi politik koordinasi.

Narasi Kontemporer: Dari Stabilitas menuju Transformasi

Jika diringkas, Indonesia hari ini sedang berdiri di tiga persimpangan besar.

Persimpangan pertama adalah antara **stabilitas** dan **transformasi**. Stabilitas makro sudah cukup baik, tetapi transformasi struktural belum cukup dalam. Negara sudah menunjukkan kemampuan menjaga inflasi, fiskal, dan sektor eksternal, namun kualitas pekerjaan, kedalaman industrialisasi, dan produktivitas harus ditingkatkan lebih serius. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Persimpangan kedua adalah antara **nasionalisme ekonomi** dan **integrasi global**. Hilirisasi, kedaulatan pangan, energi, dan Danantara menunjukkan hasrat memperkuat posisi domestik. Tetapi Indonesia juga membutuhkan investasi asing, standar internasional, akses pasar, dan kredibilitas global. Karena itu, strategi terbaik bukan isolasi, melainkan integrasi yang selektif dan cerdas. ([Bank Indonesia](#))

Persimpangan ketiga adalah antara **ambisi politik** dan **kapasitas institusional**. Program prioritas bisa sangat ambisius, tetapi hasil akhirnya ditentukan oleh kemampuan birokrasi, kualitas tata kelola, dan disiplin evaluasi. Dalam politik pembangunan, ambisi tanpa kapasitas hanya menghasilkan kelelahan fiskal dan kekecewaan publik. Sebaliknya,

kapasitas tanpa ambisi melahirkan stagnasi. Yang dibutuhkan Indonesia adalah titik temu di antara keduanya. ([Setneg](#))

Agenda Strategis bagi Indonesia

Dari seluruh uraian di atas, ada beberapa agenda strategis yang tampak mendesak.

Pertama, Indonesia harus mengubah orientasi pertumbuhan dari sekadar kuantitas menuju kualitas. Ini berarti kebijakan industri, investasi, pendidikan, dan ketenagakerjaan harus dipadukan secara lebih erat. Tolok ukur keberhasilan bukan hanya PDB, tetapi juga produktivitas tenaga kerja, jumlah pekerjaan formal berkualitas, kenaikan upah riil, dan perluasan kelas menengah.

Kedua, hilirisasi harus dinaikkan levelnya dari pemrosesan bahan mentah menuju penguasaan teknologi, inovasi, dan penguatan ekosistem domestik. Indonesia perlu memastikan bahwa hilirisasi tidak berhenti pada "smelterisasi," tetapi berkembang menjadi industrialisasi yang menciptakan pemasok lokal, riset terapan, dan kemampuan desain serta engineering.

Ketiga, reformasi fiskal harus diletakkan pada dua kaki sekaligus: memperluas penerimaan dan meningkatkan kualitas belanja. Negara membutuhkan ruang fiskal yang lebih kuat agar agenda prioritas tidak bertumpu berlebihan pada utang atau pembiayaan jangka pendek.

Keempat, tata kelola dan akuntabilitas harus menjadi arus utama. Dalam ekonomi politik modern, kecepatan pembangunan tanpa integritas akan berbiaya mahal. Transparansi proyek, pengawasan BUMN dan lembaga investasi, kepastian hukum, serta evaluasi berbasis data harus diperkuat secara sistematis.

Kelima, strategi eksternal Indonesia harus diarahkan pada diversifikasi dan peningkatan posisi tawar. Dalam dunia yang terfragmentasi, negara yang terlalu bergantung pada satu pasar, satu sumber teknologi, atau satu

komoditas akan lebih rentan. Bebas-aktif hari ini harus berarti bebas dari ketergantungan berlebihan dan aktif membangun opsi-opsi strategis.

Keenam, demokrasi dan kapasitas negara tidak boleh diperlawankan. Pembangunan yang tahan lama membutuhkan keduanya sekaligus: institusi politik yang legitimate dan birokrasi yang efektif. Jika salah satunya lemah, pembangunan akan kehilangan fondasi.

Penutup

Indonesia dalam pusaran ekonomi politik kontemporer adalah Indonesia yang sedang diuji oleh zamannya. Ia diuji bukan karena rapuh total, melainkan karena potensi besarnya menuntut kualitas kebijakan yang juga besar. Data terbaru menunjukkan bahwa Indonesia memiliki alasan untuk percaya diri: pertumbuhan 2025 mencapai 5,11 persen, inflasi Maret 2026 masih dalam sasaran, kemiskinan dan ketimpangan menurun, pengangguran membaik, neraca perdagangan masih surplus, cadangan devisa memadai, dan disiplin fiskal relatif terjaga. Semua ini adalah modal penting. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun modal saja tidak menjamin hasil. Sejarah pembangunan menunjukkan bahwa banyak negara gagal naik kelas bukan karena kurang stabil, tetapi karena terlalu lama puas dengan stabilitas. Indonesia kini perlu bergerak dari ekonomi politik bertahan menuju ekonomi politik melompat. Lompatan itu hanya mungkin bila negara mampu menjaga keseimbangan antara keberanian dan kehati-hatian, antara nasionalisme dan keterbukaan, antara ambisi pembangunan dan kualitas institusi. Dengan demikian, masa depan Indonesia tidak terutama akan ditentukan oleh seberapa besar pusaran global yang dihadapinya, tetapi oleh seberapa matang kemampuan nasional untuk menavigasi pusaran itu menjadi kesempatan transformasi.

Glosarium

Asta Cita

Delapan misi atau arah prioritas pemerintahan Presiden 2025–2029 yang menjadi basis implementasi RPJMN.

BI-Rate

Suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang menjadi sinyal utama arah kebijakan moneter.

Cadangan devisa

Aset valuta asing yang dimiliki bank sentral untuk menjaga stabilitas eksternal, nilai tukar, dan kewajiban internasional.

Defisit fiskal

Kondisi ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara dalam satu periode anggaran.

Ekonomi politik

Bidang kajian yang membahas hubungan antara kekuasaan, institusi, kebijakan, dan distribusi sumber daya ekonomi.

Good jobs

Pekerjaan berkualitas yang umumnya memiliki produktivitas lebih tinggi, penghasilan lebih layak, prospek karier lebih jelas, dan perlindungan kerja yang lebih baik.

Gini ratio

Indikator ketimpangan distribusi pengeluaran atau pendapatan; makin tinggi nilainya, makin timpang distribusinya.

Hilirisasi

Strategi menaikkan nilai tambah sumber daya melalui pengolahan lebih lanjut di dalam negeri.

Investment grade

Kategori kelayakan kredit yang menunjukkan suatu negara atau entitas dinilai cukup aman bagi investor.

Middle-income trap

Situasi ketika suatu negara berhasil keluar dari pendapatan rendah, tetapi gagal naik menjadi negara maju karena produktivitas dan inovasinya mandek.

RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan pemerintah.

State capitalism

Model ketika negara memainkan peran aktif dalam ekonomi melalui BUMN, sovereign wealth fund, regulasi, dan arah kebijakan industri.

Surplus perdagangan

Kondisi ketika nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor.

Swasembada

Kemampuan memenuhi kebutuhan domestik dari kapasitas produksi dalam negeri.

Referensi (APA 7)

Asian Development Bank. (2026, April). *Asian Development Outlook 2026: Indonesia*. Asian Development Bank. ([Asian Development Bank](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 1 April). *The year-on-year (y-on-y) headline inflation in March 2026 was recorded at 3.48 percent.* BPS-Statistics Indonesia. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen.* BPS-Statistics Indonesia. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363.* BPS-Statistics Indonesia. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen.* BPS-Statistics Indonesia. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *November 2025: Unemployment rate was 4.74 percent and the average wage of employees was 3.33 million rupiah.* BPS-Statistics Indonesia. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 1 April). *Exports and imports of Indonesia in February 2026 reached USD22.17 billion and USD20.89 billion, respectively.* BPS-Statistics Indonesia. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, Maret). *BI-Rate tetap 4,75%: Mempertahankan stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi.* Bank Indonesia. ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, 8 April). *Official reserve assets in March 2026 remained high.* Bank Indonesia. ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026). *Inflation.* Bank Indonesia. ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, Maret). *Republic of Indonesia Presentation Book – March 2026.* Bank Indonesia. ([Bank Indonesia](#))

International Monetary Fund. (2026, 20 Januari). *Indonesia: 2025 Article IV Consultation—Press release; staff report; and statement by the Executive Director for Indonesia*. IMF. ([IMF](#))

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026, 15 Januari). *Realisasi investasi 2025 lampau target, hilirisasi melompat 43,3 persen*. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. ([Badan Koordinasi Penanaman Modal](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, 11 Maret). *Kinerja APBN awal 2026 tetap solid, menjadi shock absorber di tengah gejolak global*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. ([Kementerian Keuangan](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, Februari). *Recent economic development / APBN 2026*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. ([Fiskal Kemenkeu](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, 5 Februari). *Moody's mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada Baa2 dan menyesuaikan outlook menjadi negatif*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. ([Kementerian Keuangan](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, 4 Maret). *Fitch mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada BBB dan menyesuaikan outlook menjadi negatif*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. ([Kementerian Keuangan](#))

OECD. (2025, 3 Juni). *Indonesia reaches key milestones in OECD accession process*. OECD. ([OECD](#))

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025, 2 Desember). *OECD Economic Outlook, Volume 2025 Issue 2: Indonesia*. OECD. ([OECD](#))

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025, 7 Maret). *RPJMN 2025–2029: Fondasi awal wujudkan visi Indonesia Emas 2045*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. ([Setneg](#))

S&P Global Ratings. (2026, 4 Maret). *S&P reaffirms global confidence in Indonesia: Maintains Indonesia sovereign credit rating at "BBB" with stable outlook*. S&P Global Ratings / DJPPR Kementerian Keuangan. ([DJPPR](#))

World Bank. (2025, 17 Desember). *Indonesia's economy maintains resilience amid global uncertainty*. World Bank. ([World Bank](#))

World Bank. (2025). *A roadmap from homes to jobs to prosperity in Indonesia*. World Bank. ([The World Bank Docs](#))

World Bank. (2026, 23 Januari). *Running faster, for longer: Structural transformation, productivity, and good jobs*. World Bank. ([Open Knowledge Repository](#))

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 12 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69db2b55-d1e0-839d-a4bd-0a62d9f59c78>